



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anies Kebut Program Sertifikasi Aset

**JAKARTA** - Pemprov DKI Jakarta mempercepat program sertifikasi aset yang berada di wilayahnya. Upaya yang dilakukan dengan mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas).

Gerakan ini sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tertib administrasi pertanahan aset Pemprov DKI menuju Jakarta Satu Peta pada 2019. "Kita berharap Jakarta memiliki peta dasar yaitu Jakarta Satu," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulomas, Jakarta Timur, kemarin.

Menurut dia, peta dasar tersebut akan menjadi rujukan untuk semua informasi kewilayahan di Jakarta yang nanti terintegrasi dengan informasi perpajakan, kependudukan, dan informasi kepemilikan aset baik tanah maupun barang lainnya.

**Karena itu, sekarang bersama wali kota, camat, lurah, kemudian RT/RW bergerak memberikan tanda batas di lahan mereka sendiri. Dengan begitu, saat petugas datang bisa langsung melakukan eksekusi.**

ANIES BASWEDAN  
Gubernur DKI Jakarta

Salah satu kendala dalam penyusunan peta dasar yakni pencatatan ukuran-ukuran bidang tanah, di mana ketika

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendatangi lokasi yang belum tercatat untuk pengukuran belum tentu dapat menemui pemiliknya.

"Karena itu, sekarang bersama wali kota, camat, lurah, kemudian RT/RW bergerak memberikan tanda batas di lahan mereka sendiri. Dengan begitu, saat petugas datang bisa langsung melakukan eksekusi," ungkapnya.

Gerakan pemasangan tanda batas juga memudahkan program sertifikasi aset yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp120 miliar untuk 282.000 bidang tanah masyarakat yang belum tersertifikasi. Apalagi, sekitar 1,6 juta bidang tanah di Jakarta belum tercatat dengan baik kepemilikannya.

Melalui gerakan pemasangan tanda batas ini, Anies berharap tidak ada lagi tanah masyarakat yang tidak bersertifikat dan masyarakat memiliki peluang sama agar terpetakan tanahnya secara sistematis. Dengan demikian, pendataan akan lebih mudah dan status tanah lebih jelas serta terselesaikannya polemik tentang batasan tapak tanah.

Masyarakat juga memperoleh kepastian hukum sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di mana di dalamnya menginstruksikan pada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang bertujuan menjamin ke-

pastian hukum (*rechts-kadaster*). "Sertifikasi ini hanya bisa berjalan jika data tentang tanahnya lengkap, salah satunya data mengenai ukuran," kata Anies.

Selama ini pengelolaan aset DKI dinilai buruk. Salah satu penilaian utama atas predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran DKI sejak 2012-2016 adalah buruknya pengelolaan aset. Saking buruknya sempat terjadi pembelian lahan milik Pemprov DKI di Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan Pemprov DKI sendiri.

Pada 2017 Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dibentuk terpisah dari pengelolaan keuangan agar fokus menginventarisasi sekaligus menyelesaikan sengketa aset sesuai ketentuan berlaku. Pembentukan BPAD sedikit berhasil mengubah predikat penggunaan anggaran DKI menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski meraih predikat WTP, BPAD hingga saat ini belum maksimal menginventarisasi sekaligus mengelola aset milik DKI.

Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Jaya mengapresiasi Pemprov DKI atas sinerginya dalam membantu percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Jakarta. Ini sejalan dengan keinginan Pemprov DKI yang mencita-citakan 2019 Jakarta Satu Peta.

Saat ini terdapat 332.655 bidang tanah penerima bantuan. Dengan alokasi Rp120 miliar untuk 282.000 bidang tanah diharapkan bidang tanah yang belum disertifikasi rampung dan tahun depan seluruh bidang tanah di DKI terdaftar.

"Saya kira ini baik sekali karena seluruhnya akan terjamin kepastian tertib administrasinya, kepastian hukumnya, kepastian pengunaannya, dan lingkungan hidupnya," kata Jaya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, buruknya pengelolaan aset di Jakarta sudah terjadi sejak dulu dan harus ada manajemen aset yang benar untuk memperbaikinya. Maka itu, BPAD dipisahkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Kendati demikian, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana perusahaan swasta harus segera diserahkan kepada Pemprov DKI agar ke depan tidak lagi bermasalah dan akhirnya hilang. "BPAD berat tugasnya karena aset di DKI bukan punya unit, melainkan sertifikatnya nama Pemprov DKI. Harus ada inventarisasi kemudian sertifikasi dan dimasukkan dalam sistem," ujar Taufik.

Dia menjelaskan, aset itu memiliki empat bentuk, yakni ada surat ada barang, ada surat tidak ada barang, tidak ada surat ada barang, serta ada surat ada barang, tetapi dimanfaatkan pihak lain. Dengan demikian, dia optimistis tidak ada sekolah yang lantai pertamanya buat sekolah, namun lantai duanya untuk rumah tinggal.

"Paling penting itu segera catat aset yang dikerjakan perusahaan swasta. Banyak fasilitas sosial maupun fasilitas umum yang belum diserahkan terimakan dan dimasukkan di neraca. Kalau aset itu harus masuk neraca, jangan-jangan Balai Kota DKI tidak ada dalam neraca. Jadi nilai Balai Kota dahulu dengan sekarang pasti berbeda," terangnya.



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sinco	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anies Kebut Program Sertifikasi Aset

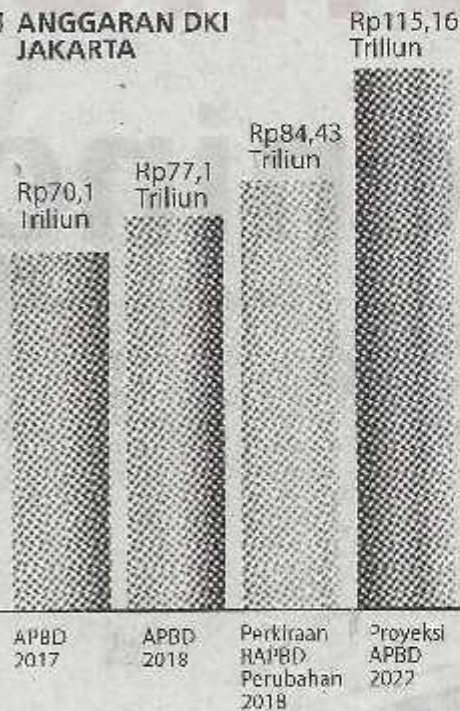
## BENAH ASET DAERAH

Pengelolaan aset daerah di Jakarta masih buruk. Banyak aset belum tercatat dengan baik. Karena itu, Pemprov DKI menggandeng masyarakat untuk mengatasi pengelolaan aset tersebut.

1,6 juta bidang tanah belum tercatat dengan baik

Pemprov DKI kucurkan Rp120 Miliar untuk 282.000 bidang tanah

### ANGGARAN DKI JAKARTA



### Belanja Daerah: Rp71,16 Triliun

- Belanja Tidak Langsung Rp30,65 triliun meliputi Belanja Pegawai Rp20,12 triliun, Belanja Bunga Rp50,52 miliar, Belanja Subsidi Rp4,21 triliun, Belanja Hibah Rp1,75 triliun, Belanja Bantuan Sosial Rp4,07 triliun, Belanja Bantuan Keuangan Rp271,78 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp153,02 miliar.
- Belanja Langsung sebesar Rp40,51 triliun

### Pengeluaran Pembiayaan: Rp5,94 Triliun

- Penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan
- Penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana Asian Games 2018
- Pembayaran utang pokok

Sumber: Pemerintah DKI Jakarta melalui data dan statistik sumber

### Daerah DKI 2018

